

DARTAR RUJUKAN

Buku :

Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDA KARYA: Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

Higau, Clement Belly Heden.2015. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Longhubung Kabupaten Mahakam Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintahan* . Volume 3 : 1449-1458.

Lestari, Eka Rini.2015. Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Ejournal Administrasi Negara*. Volume 3 : 467-471.

Rahmat, PupuSaiful.2009.PenelitianKualitatif.Equilibrium. Volume 5 :1-8.

Rahmatullah, Indra. 2013. Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Cinta Hukum*. Volume 1:216-226.

Suparto .2016.Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat* . Volume 4 : 116-129.

Rujukan dari ArtikelInternet :

Marzuki , Masnur .2010.PemisahanKekuasaan Dan Prinsip Checks And Balances dalam UUD 1945, Makalah Pada Acara PendidikanKesadaran Berkonstitusi untukGuruSMPdiKotaYogyakarta,tanggal18Desember2010.(online),(<http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2010/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html>), diakses Sunday, Desember 25, 2011, diunduh hari kamis tanggal 8 Juni 2017.

Yulianti, Waidkha. 2012. The Federalist Paper Karya Filsafat Politik dan Pemerintahan Pragmatis 1787-1788. (online), (<http://sejarahwaidkhauny.blogspot.co.id/2012/12the-federalist-paper-karya-filsafat.html>), diakses, 3 desember 2016.

Skripsi :

Latif, Fathir Rizkia. 2014. Lembaga-Lembaga Negara” *Check and Balances* System: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung. <http://www.academia.edu/9639370/prinsip-checks-and-balances-pada-lembaga-Negara-at-BULLET-Esensi-Checks-and-balances> .di unduh pada hari sabtu, 10 juni 2017.

Prasetyawati, Ika. 2016. Relasi Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Study Kasus *Checks and Balances* Pemerintahan Desa di Desa Mrayan Kecamatan Ngarun Kabupaten Ponorogo: Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Undang-undang

Undang-undang Nomer. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. 2014. Surabaya: Rona Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomer 9 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.